

PEMBERDAYAAN PLKB DAN PPKBD MELALUI PELATIHAN KIE/KONSELING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN KB DI KABUPATEN MAMUJU

Erna Amin^{1*}, Ajeng Hayuning
Tiyas², Yulianti Anwar³

^{1), 2), 3)} DIII Kebidanan, Poltekkes
Kemenkes Mamuju

Article history

Received : 8 Desember 2023

Revised : 29 Februari 2024

Accepted : 29 Juni 2024

*Corresponding author

Erna Amin

Email : midwife_erna@yahoo.com

Abstrak

Tingginya jumlah penduduk di Indonesia salah satu sebabnya adalah tingginya *Total Fertility Rate (TFR)*. Sedangkan penyebab tingginya TFR adalah *Contraceptive Prevalence Rate* yang rendah salah satunya di Kabupaten Mamuju dengan presentase CPR sebesar 49,15% pada tahun 2021. Perlu adanya penguatan pemberdayaan kader khususnya PLKB (Petugas Lapangan KB) sebagai garda terdepan yang mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman, pengetahuan melalui KIE kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB. Tujuan kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PLKB dan PPKBD dalam melakukan KIE/konseling KB sehingga dapat meningkatkan cakupan keikutsertaan KB pada PUS di Kabupaten Mamuju. Mitra dan sasaran kegiatan ini yaitu Kepala Dinas PPKB, PLKB, PPKBD, dan pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Mamuju. Kegiatan PKM dilakukan dengan memberikan pelatihan KIE/konseling KB untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PLKB dalam melakukan KIE, serta pendampingan PLKB melalui pemberian ABPK berupa RODA KLOP, dan pemantauan penjangkaran calon akseptor KB sampai mendapatkan pelayanan sesuai dengan target. Hasil yang dicapai yaitu peningkatan pemahaman PLKB dalam melakukan KIE/Konseling dengan rata-rata nilai *posttest* sebesar 75.

Kata Kunci: KIE; Konseling; KB

Abstract

The cause of the high population in Indonesia is due to the high Total Fertility Rate. One of the causes of the high TFR is the low Contraceptive Prevalence Rate (CPR), one of which is in Mamuju Regency, with a CPR percentage of 49.15% in 2021. There is a need to strengthen the empowerment of cadres, especially PLKB (KB Field Officers) as the front guard who have a vital role in providing understanding and knowledge through IEC to the community about the importance of participating in the family planning program. This community service activity aims to increase the knowledge and skills of PLKB and PPKBD in carrying out IEC/family planning counseling to improve the coverage of family planning participation in EFA in Mamuju Regency. The partners and targets of this Community Service (PKM) activity are the Heads of the PPKB, PLKB, PPKBD Services, and couples of childbearing age (PUS) in the Mamuju District and Simboro District, Mamuju Regency. This community service activity is carried out by providing KIE training/family planning counseling to increase PLKB's knowledge and skills in carrying out KIE, as well as delivering PLKB assistance through providing ABPK in the form of KLOP WHEELS, and monitoring the selection of prospective family planning acceptors until they receive services according to the target. The results achieved were an increase in understanding of PLKB in carrying out IEC/Counseling with an average post-test score of 75.

Keywords: Counseling; Family Planning

Copyright © 2024 Erna Amin, Ajeng Hayuning Tiyas, Yulianti Anwar

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki masalah kependudukan berbeda. Masalah ini karena adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penduduk (Majid, 2021). Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 dari seluruh dunia (Dewi, 2020). Dikarenakan pertumbuhan penduduk Indonesia kurang terkendali dan tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan potensi ekonomi yang seimbang, akan

menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan penduduk di Negara tersebut dan berakibat pada banyaknya masyarakat yang menganggur dan peningkatan angka kriminalitas (Kawet et al., 2021).

Jumlah penduduk di Indonesia yang besar disebabkan karena tingginya *Total Fertility Rate* (TFR) yaitu sebesar 2.4 per perempuan usia subur. Tidak sesuai dengan target 2.31 pada tahun 2018 dan 2.1 pada tahun 2020 (K. R. D. Sari, 2022). Rendahnya angka *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) merupakan salah satu penyebab tingginya TFR. Terjadi penurunan penggunaan kontrasepsi modern dari 57,9% menjadi 57,2% utamanya pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang menurun 4% (Bidarti, 2020; A. P. Sari et al., 2023). Selain itu, adanya peningkatan *Unmet Need* KB terutama pada ibu pasca bersalin juga merupakan salah satunya penyebab tingginya TFR (Silvia et al., 2022).

Pada tahun 2021 di Kabupaten Mamuju presentase CPR sebesar 49,15%, terendah ketiga di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Majene (33,30%) dan Kabupaten Polewali Mandar (34,35%), masih jauh dari target nasional 61,78% pada tahun 2020 dan 63,41% pada tahun 2024. Di Kabupaten Mamuju sendiri menunjukkan adanya penurunan tren penggunaan kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) dari 65,16% pada tahun 2021 menurun menjadi 57,57% pada tahun 2022 (Tiyas et al., 2023). Angka tersebut masih belum memenuhi target DPPKB Kab. Mamuju sebesar 65% pada tahun 2022, dan target nasional sebesar 62,54% pada tahun 2022. Sedangkan untuk persentase *unmet need*, Kabupaten Mamuju adalah wilayah dengan persentase *unmet need* tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali mandar yaitu 32,39%. Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju menjadi wilayah dengan persentase *unmet need* tertinggi di Kabupaten Mamuju, yaitu 40,01% untuk wilayah Kecamatan Simboro dan 37,93% untuk wilayah Kecamatan Mamuju.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi masalah kependudukan. Program KB dapat menurunkan angka fertilitas, namun juga banyak terdapat kendala dalam pelaksanaannya diantaranya adanya kebutuhan terhadap kontrasepsi yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) karena berbagai faktor dan masih kurangnya penggunaan kontrasepsi modern. Hal ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam upaya program KB (Kemenkes, 2020). Populasi penduduk yang tidak terkontrol menyebabkan permasalahan ekonomi, sosial dan merambah ke kriminalitas. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat itu sendiri, perlu memperhatikan program Keluarga Berencana tersebut (Pragita et al., 2021). Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan memberikan layanan kontrasepsi tanpa biaya bagi seluruh masyarakat (Zultha, 2022). Layanan BPJS sengaja ditekankan pada layanan KB modern guna meningkatkan minat PUS untuk menggunakan KB modern, khususnya bagi PUS yang *unmet need*. Untuk mendorong minat PUS tersebut harus didukung dengan peran PLKB dan PPKBD guna meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengaruh pada PUS untuk menggunakan KB modern.

Berdasarkan hasil penelitian Tiyas et al (2022), ada banyak faktor yang mempengaruhi kompleksnya masalah kependudukan di Kabupaten Mamuju, salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia, khususnya PLKB di Kabupaten Mamuju. Terbatasnya anggaran yang ada untuk meningkatkan kapasitas PLKB dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya kualitas PLKB dalam melakukan tugasnya dalam menyukseskan program KB (Tiyas et al., 2023). Salah satu hal yang dilakukan oleh PLKB, yaitu menetapkan dan menginformasikan jadwal konseling kepada PUS dan melakukan edukasi dengan pendekatan dan berpartisipasi dalam suksesnya program MKJP, terbukti mampu meningkatkan akseptor KB (Jusriani et al., 2022).

Konseling merupakan salah satu kegiatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Konseling KB dapat membantu ibu menentukan pilihan dari banyaknya alternatif alat kontrasepsi (Gudino et al., 2024). Informasi yang diberikan kepada klien harus lengkap, jujur dan benar tentang metode kontrasepsi yang akan digunakan. Pengambilan keputusan sasaran dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang program KB dan informasi mengenai alat kontrasepsi (Sinaga, 2020). Konseling KB berpengaruh terhadap pengambilan keputusan alat kontrasepsi pada ibu nifas (Maftuha et al., 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut perlu adanya penguatan pemberdayaan kader khususnya PLKB (Petugas Lapangan KB) sebagai garda terdepan yang mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman, pengetahuan melalui KIE kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB. Penguatan pemberdayaan tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan pelatihan KIE dan konseling pemilihan kontrasepsi yang tepat dan tata laksana pengelolaan efek samping KB sehingga diharapkan dengan edukasi yang baik para akseptor memiliki kepuasan terhadap kontrasepsi yang dipakai sehingga keberlangsungan penggunaan KB dapat lebih lama. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan PKM ini sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan KB modern melalui kegiatan pemberdayaan PLKB dan PPKB di wilayah Kab. Mamuju. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PLKB dalam memberikan KIE/konseling KB kepada PUS melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan serta meningkatkan cakupan penggunaan KB.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pemberdayaan PLKB dan PPKBD dalam meningkatkan keikutsertaan program KB melalui Pelatihan KIE/Konseling KB di Kabupaten Mamuju diawali dengan identifikasi atau pengkajian untuk menentukan jumlah kelompok sasaran, yaitu jumlah PUS dengan *unmet need* dan jumlah PUS KB aktif. Setelah itu, dilakukan penetapan masalah agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dimana terdapat dua kegiatan inti yang dilakukan, yaitu: Pemberdayaan PLKB dan PPKBD melalui kegiatan pelatihan KIE/Konseling dan pendampingan PLKB dalam melakukan konseling pada sasaran KB.

Kegiatan pelatihan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2023 bertempat di aula Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mamuju dengan peserta pelatihan sebanyak 12 orang PLKB dan PPKBD dari 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Adapun narasumber pada kegiatan ini terdiri dari 3 orang yaitu dr. Hj. Hajrah As'ad, M.Kes (Kepala Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mamuju), Hj. Zamrudiah, S.E.,M.AP (Kabid KB DPPKB Kabupaten Mamuju), dan Ajeng Hayuning Tiyas, S.ST.,M.Krb (Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mamuju). Pada pelatihan ini, PLKB dibekali materi pelatihan tentang Konsep kependudukan dan KB, Strategi dan Program KB, Konseling KB dengan ABPK, Penapisan kriteria kelayakan medis pengguna kontrasepsi dengan RODA KLOP, Macam-macam KB (indikasi, kontraindikasi, kekurangan, kelebihan, efek samping, informasi alur tata laksana pengelolaan efek samping). Dalam pelatihan ini juga dilakukan pemberian modul pelatihan dan ABPK Roda KLOP sebagai alternatif alat bantu pengambilan keputusan ber-KB (ABPK) dikarenakan jumlah ketersediaan ABPK yang terbatas di DPPKB Kabupaten Mamuju.

Kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi dan pendampingan setelah pelatihan. Pendampingan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan keterampilan PLKB dan PPKBD dalam melakukan konseling KB. Kegiatan pendampingan direncanakan pada tanggal 17 Oktober 2023. Pendampingan dilakukan dengan mengundang sasaran WUS ke balai KB Kecamatan Binanga Kabupaten Mamuju. Kemudian PLKB yang telah mengikuti pelatihan melakukan konseling KB kepada sasaran yaitu WUS. Dengan pendampingan ini, maka pelaksana dapat menilai sejauh mana pemahaman PLKB dalam pemberian KIE terhadap calon akseptor. Kegiatan terakhir yaitu penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dilakukan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan ini sehingga memiliki dampak maksimal pada masyarakat.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabmas diawali dengan perizinan kepada Kepala Dinas PPKB Kab. Mamuju pada tanggal 17 Mei 2023 dan diteruskan ke PLKB Kec. Mamuju dan Kec. Simboro. Pada tanggal 12 September 2023, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PPKB dan Kepala Bidang KB Kab. Mamuju tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan data awal cakupan KB serta sasaran PLKB dan PUS di Kec.

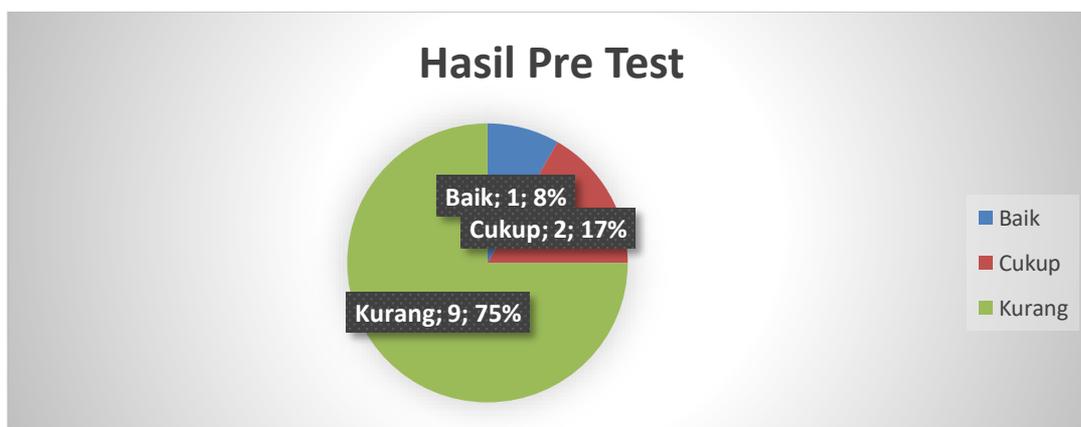
Mamuju dan Kec. Simboro untuk diidentifikasi oleh tim pengabmas. Selanjutnya tim pengabmas melakukan koordinasi dengan PLKB dan narasumber terkait persiapan pelaksanaan kegiatan.

Pada tanggal 02 dan 03 Oktober 2023, tim pengabmas melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan menemui mitra dan sasaran untuk menyampaikan undangan kegiatan serta teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk mendata dan mengidentifikasi sasaran peserta kegiatan. Tim juga meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan dan mempersiapkan ruangan kegiatan.



Gambar 1. Koordinasi Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2023, bertempat di Aula Dinas PPKB, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Peserta yang hadir total sebanyak 20 orang dengan rincian 12 orang PLKB dan PPKBD, 2 orang narsum, 3 tim PkM dan 3 orang mahasiswa. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh MC, doa, sambutan dari Kepala Dinas dan Ketua Tim. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta pelatihan sebelum menerima materi maka dilakukan *pretest* dengan memberikan kuesioner kepada peserta kegiatan. Hasil *pretest* peserta digambarkan pada grafik berikut:



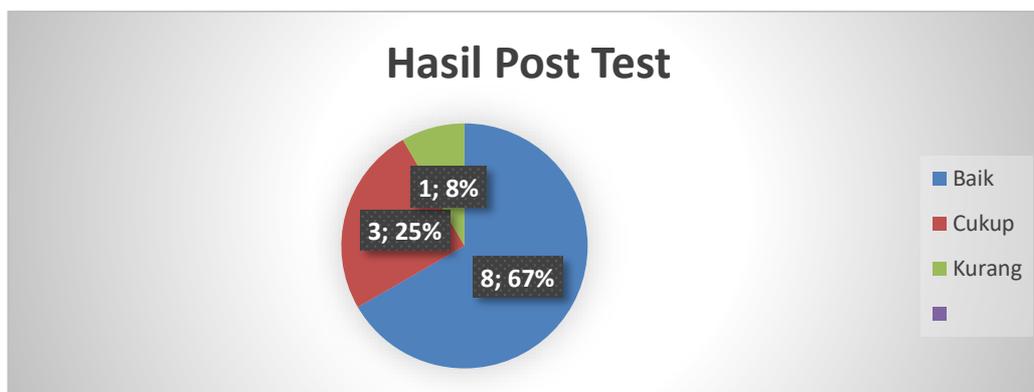
Gambar 2. Hasil PreTest

Berdasarkan hasil *pretest* kegiatan pelatihan KIE/Konseling pada PLKB menunjukkan bahwa dari 12 orang peserta kegiatan, sebagian besar tingkat pengetahuan peserta berada pada kategori kurang yaitu 9 orang (75%), 2 orang cukup (16,6%) sedangkan yang memiliki pengetahuan awal dalam kategori baik sebanyak 1 orang (8,3%).

Setelah dilakukan *pretest*, dilanjutkan dengan pemberian materi pelatihan konseling secara bergantian oleh ke-3 narasumber. Pemberian materi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah interaktif, penayangan video serta *roleplay* dan simulasi. Adapun materi yang diberikan antara lain: 1) Kebijakan dan strategi pelayanan KB; 2) Konseling KB dengan ABPK, 3) Penapisan Kriteria Kelayakan Medis Penggunaan Kontrasepsi dengan Roda KLOP. Materi-materi tersebut juga terdapat didalam modul pelatihan KIE/Konseling yang telah disusun sebelumnya dan dibagikan kepada para peserta pelatihan. Selain pemaparan materi, juga dilakukan simulasi dan *role play* pelaksanaan pemberian konseling dari PLKB ke calon akseptor KB dengan menggunakan roda KLOP. Alat bantu roda KLOP ini juga akan diberikan kepada PLKB yang hadir sebagai bentuk investasi kepada masyarakat dari tim PkM. Diharapkan dapat menjadi ABPK pada saat PLKB menjalankan tugasnya memberikan KIE/konseling kepada PUS. Pemberian Roda KLOP diberikan kepada seluruh PLKB yang hadir pada saat pelatihan.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan



Gambar 4. Distribusi Hasil *Post Test* Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Peserta bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan keterlibatan aktif peserta dalam melakukan demonstrasi dan simulasi. Sebagai bentuk evaluasi kegiatan, dilakukan *posttest* untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta setelah diberikan materi pelatihan. Hasil *posttest* peserta kegiatan digambarkan dalam grafik pada gambar 4 di atas. Berdasarkan hasil *post test* kegiatan pelatihan KIE/Konseling pada PLKB menunjukkan bahwa dari 12 orang peserta kegiatan, terdapat

peningkatan pengetahuan terkait pemberian KIE/Konseling. Hasil post test menunjukkan bahwa yang termasuk baik sebesar 8 orang (66,6%), cukup 3 orang (25%), dan kurang 1 orang (8,3%).

Tabel 1. Perbandingan Hasil PreTest dan PostTest

Nama	Nilai Pre Test	Nilai Post Test	Keterangan
Ny "N"	45	80	Meningkat
Tn "T:	30	70	Meningkat
Ny "H"	60	85	Meningkat
Ny "NI"	45	80	Meningkat
Tn "A"	35	75	Meningkat
Tn "S"	30	70	Meningkat
Tn "P"	35	45	Meningkat
Ny "S"	45	80	Meningkat
Ny "M"	65	85	Meningkat
Tn "R"	30	75	Meningkat
Ny "Nu"	80	90	Meningkat
Ny "Su"	35	70	Meningkat

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terjadi peningkatan pengetahuan peserta, nilai rata-rata peserta meningkat dari 44,58 menjadi 75. Adanya peningkatan pengetahuan ini menjadi salah satu indikator penting keberhasilan kegiatan.

Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan peserta pelatihan dalam melakukan konseling KB pada sasaran. Kegiatan pendampingan dilakukan selama 3 hari setelah pelaksanaan pelatihan yaitu pada tanggal 6, 7 dan 8 Oktober 2023. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan PkM yang sudah dilakukan. Para PLKB yang sudah dilatih didampingi oleh tim pelaksana PkM ketika melakukan KIE/konseling KB kepada calon akseptor KB menggunakan alat bantu Roda KLOP. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan KIE/konseling KB yang diberikan PLKB sesuai dengan prosedur sehingga informasi yang diperoleh calon akseptor KB tepat dan komprehensif. Dari konseling yang dilakukan diharapkan calon akseptor KB dapat memahami kondisi mereka dan membantu calon akseptor memutuskan dan memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka, sehingga dapat meningkatkan penerimaan klien terhadap kontrasepsi yang dipilihnya.

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada PLKB dalam melaksanakan tugasnya memberikan KIE/konseling pada PUS di wilayah kerja masing-masing. Sebagai bentuk pengembangan program, nantinya setiap PLKB yang sudah dilatih akan dipantau jumlah target sasaran PUS yang telah diberikan konseling hingga mendapat pelayanan KB di fasilitas kesehatan. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi cakupan keikutsertaan KB di wilayah tersebut.



Gambar 5. Pendampingan PLKB dalam Memberikan Konseling KB



Gambar 6. Pemberian Roda KLOP kepada PLKB

Tugas PLKB adalah memberikan KIE awal dan melakukan pendampingan WUS/akseptor KB ke tenaga kesehatan yang berwenang melakukan konseling dan tata laksana. Keterbatasan anggaran pada UPTD terkait membuat kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas PLKB dalam menjalankan tugasnya. Dengan pelaksanaan kegaitan PkM ini, dapat membantu meningkatkan kompetensi dari PLKB dan PPKDB dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Sehingga dapat membantu menurunkan angka *unmet need* KB khususnya di Kabupaten Mamuju yang salah satu penyebabnya adalah adanya informasi yang keliru terkait program KB ini di masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pemberdayaan PLKB dan PPKDB melalui Pelatihan KIE/Konseling KB dalam Meningkatkan Keikutsertaan KB di Kec. Mamuju dan Simboro Kabupaten Mamuju" ini menghasilkan peningkatan pemahaman PLKB dalam melakukan KIE/Konseling dengan rata-rata nilai *posttest* sebesar 75. Pendampingan PLKB dalam melakukan KIE/Konseling pada calon akseptor juga telah dilakukan namun untuk peningkatan keikutsertaan KB belum dapat dievaluasi karena data cakupan KB masih dalam proses pengumpulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Mamuju, Ibu Kepala Dinas beserta jajarannya atas kesediaan menjadi mitra dan mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini.

PUSTAKA

Bidarti, A. (2020). *Teori kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari.

Dewi, S. (2020). Penduduk dan Ekonomi (Kasus di Indonesia). *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).

Gudino, I. D. V., Stefania, M., & Tanu, A. O. (2024). Pengaruh Pemberian Konseling Kb Terhadap Tingkat Pengetahuan Akseptor Kb Tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Puskesmas Lurasik Tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Komunitas Santa Elisabeth*, 1(02), 79–89.

Jusriani, J., Rifai, M., & Juhanto, A. (2022). Analisis Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Jumlah Akseptor "MJKP." *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 1(1), 33–45.

- Kawet, J. A., Masinambow, V. A. J., & Kawung, G. M. V. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di kota manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 62–79.
- Kemenkes, R. I. (2020). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.
- Maftuha, M., Purnamasari, D., & Hariani, W. F. (2022). Pengaruh konseling keluarga berencana terhadap pengambilan keputusan alat kontrasepsi pada ibu nifas. *WOMB Midwifery Journal*, 1(1), 22–26.
- Majid, R. (2021). *Dasar Kependudukan*. Penerbit Nem.
- Pragita, R., Boham, A., & Rembang, M. (2021). Persepsi Masyarakat tentang Pentingnya Keluarga Berencana di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 3(1).
- Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., & Ramadan, M. I. (2023). Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1), 29–37.
- Sari, K. R. D. (2022). Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Silvia, D., Ratnasari, F., & Winarni, L. M. (2022). Literature Review: Pemberian Konseling Keluarga Berencana terhadap Pengambilan Keputusan Akseptor Memilih Keluarga Berencana Pasca Persalinan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1205–1213.
- Sinaga, W. S. (2020). *Pengambilan Keputusan Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Program Keluarga Berencana (KB)*.
- Tiyas, A. H., Amin, E., Anwar, Y., & Tarnoto, T. (2023). Organizational Barriers in Reducing Unmet Need for Family Planning in Mamuju District. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 9(1), 52–65.
- Zultha, A. A. (2022). *Strategi Komunikasi Bkkbn Provinsi Lampung Dalam Program Kampung Kb Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*.

Format Sitasi: Amin, E., Tiyas, A.H. & Anwar, Y. (2024). Pemberdayaan PLKB dan PPKBD Melalui Pelatihan KIE/Konseling dalam Rangka Meningkatkan Keikutsertaan KB di Kabupaten Mamuju. *Reswara. J. Pengabdian Kpd. Masy.* 5(2): 427-434. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i2.4068>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercialL ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))